PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	IHSAN BASIR, SH.,LLM
Jabatan	:	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama	:	Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si
Jabatan	:	GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si	**IHSAN BASIR, SH.,LLM**
	NIP. 19701109 199803 1 016

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	- Persentase Desa Mandiri	23,89%
		- Persentase Desa sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat Status Desanya	61,54%

	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 11.074.827.767,62	APBD
2	Program Penataan Desa	Rp. 1.423.812.660,00	APBD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 195.849.801,00	APBD
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 11.872.158.032,00	APBD

Palu, 20 Februari 2026

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

IHSAN BASIR, SH.,LLM
NIP. 19701109 199803 1 016

Dipindai dengan CamScanner